

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang terkait dalam hubungan keluarga, baik antara orangtua dengan anaknya, suami dengan istrinya, maupun kakak dengan adiknya (Rahma dkk, 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena politik dinasti kembali muncul dan berkembang pada kontestasi politik di Indonesia. Salah satu fenomena politik dinasti yang ramai diperbincangkan adalah majunya putra pertama dan menantu Presiden Jokowi pada Pilkada serentak 2020. Gibran, sebagai putra pertama Presiden Jokowi berhasil menang pada Pilkada Solo dengan perolehan 86,5% suara. Adapun Bobby sebagai menantu Presiden Jokowi berhasil menang pada Pilkada Medan dengan perolehan 53,45% suara (Asrawija, 2022). Majunya Pilar Saga Ichsan pada Pilkada Tangerang Selatan 2020 juga menjadi fenomena politik dinasti yang cukup mencuat. Pilar adalah putra dari Ratu Tatu Chasanah yang merupakan Walikota Serang sekaligus keponakan Ratu Atut yang merupakan mantan Gubernur Banten. Pilar berhasil terpilih sebagai Wakil Walikota Tangerang Selatan dengan perolehan 40,9% suara (Adita & Ruliana, 2022). Selain dua fenomena tersebut, masih ada banyak lagi isu politik dinasti yang terjadi pada kontestasi politik di tingkat lokal dan daerah. Atas dasar fenomena tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fenomena politik dinasti masih ada dan terus berkembang pada kontestasi politik di Indonesia.

Di era saat ini, politik dinasti seringkali dipandang sebagai penghambat kemajuan demokrasi. Meskipun di era kerajaan istilah politik dinasti sangat familiar digunakan,

namun sebagian kalangan memandang bahwa politik dinasti tidak tepat untuk digunakan pada sistem pemerintahan modern. Sebagian besar pengamat politik memandang bahwa praktik politik dinasti cenderung mengabaikan prinsip meritokrasi, di mana kesempatan untuk memimpin lebih didasarkan pada hubungan keluarga daripada kemampuan dan prestasi. Selain itu, politik dinasti juga berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, dimana sumber daya negara dan fasilitas pemerintahan dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarga (Silalahi, 2019).

Agus Dedi (2022) pada kajiannya mengenai politik dinasti dalam perspektif demokrasi menemukan bahwa tantangan terbesar dalam membangun demokrasi yang bernilai adalah fenomena politik dinasti. Politik dinasti dapat ditandai dengan keadaan dimana kekuasaan pada suatu wilayah selalu dipegang oleh kelompok keluarga ataupun kerabat tertentu. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat memicu peningkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada birokrasi pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh sebab itu, Agus Dedi dalam tulisannya menekankan bahwa fenomena politik dinasti harus dijadikan sebagai bahan pemikiran bersama, khususnya bagi para elite dan pemangku kepentingan agar dapat melahirkan alternatif solusi pada regulasi pemilihan kepala daerah di Indonesia (Dedi, 2022).

Sejalan dengan Agus Dedi, Asitha Dewi Mustika Syanur dkk (2023) dalam kajiannya mengenai tinjauan kritis terhadap penerapan demokrasi di era Jokowi menilai bahwa fenomena politik dinasti yang terjadi dan berkembang di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran etika dalam pelaksanaan demokrasi. Mereka memandang bahwa politik dinasti dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin politik yang rusak, dimana orientasinya dalam menjalankan fungsi partai politik tidak berjalan secara optimal. Politik dinasti telah mengubah cara kerja partai politik dalam proses pemilihan calon pemimpin dalam kontestasi, dimana pemilihannya tidak didasarkan pada proses

kaderisasi yang baik dan hanya dilandaskan pada popularitas yang dimiliki keluarga maupun kerabat tertentu. Jika terus dibiarkan, partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas akan tertutup karena sirkulasi kekuasaan hanya berputar terus menerus di kalangan elit, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya negosiasi dalam menjalankan tugas kenegaraan (Syanur, A. W., & Afrilia, 2023).

Meski sering dipandang dalam konotasi negatif, ada sebagian kalangan yang melihat fenomena politik dinasti dari sisi sebaliknya. Bagi sebagian orang, politik dinasti dapat dipandang sebagai langkah yang tepat dalam meningkatkan stabilitas dan kesinambungan dalam pemerintahan. Hal ini terjadi karena penerus dari dalam keluarga umumnya memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan dan visi yang telah dirancang oleh pendahulu mereka. Anggota keluarga yang melanjutkan kekuasaan cenderung sudah terlibat dalam proses pengambilan keputusan sebelumnya, sehingga mereka mampu melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan lebih mulus. Anggota keluarga yang melanjutkan dinasti politik sering kali memiliki pengalaman dan jaringan yang luas, yang dapat menjadi aset penting dalam menjalankan pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan (Tan, 2024).

Jean Lacroix dkk (2019) dalam kajiannya berjudul “*A Positive Effect of Political Dynasties: The Case of France's 1940 Enabling Act*” mengemukakan bahwa mereka memiliki pandangan berbeda dari sekian banyak orang mengenai fenomena politik dinasti. Mereka memandang politik dinasti berdasarkan situasi dan konteks sejarah yang terjadi di Perancis pada tahun 1940, dimana pada saat itu Perancis mengalami krisis akibat perang dunia kedua. Dalam upaya menyelesaikan krisis, mereka mengesahkan Undang-Undang yang dikenal sebagai *Acte constitutionnel du 10 juillet 1940* untuk memberikan kekuasaan penuh pada Marsekal Pétain dalam merubah konstitusi negara dan membangun dinasti politiknya. Meski dikenal otoriter, Dinasti Politik Marsekal

Pétain dipandang berhasil dalam memberikan stabilitas atau kepemimpinan yang diperlukan selama masa krisis. Dari fakta tersebut, Jean Lacroix dkk menekankan bahwa politik dinasti tidak sepenuhnya buruk seperti yang disampaikan kebanyakan orang. Politik dinasti dapat memberikan dampak positif sebagaimana yang terjadi pada Perancis di tahun 1940 (Lacroix, Meon, & Oosterlinck, 2019).

Sejalan dengan Jean Lacroix dkk, Ludigil Garces dkk (2021) dalam penelitiannya berjudul “*Political Dynasties and Economic Development: Evidence using Nighttime Light in the Philippines*” mengungkapkan bahwa ada sisi positif yang tidak semua orang dapat pahami dari praktik politik dinasti. Dalam kajiannya yang dilakukan di Filipina, mereka menemukan bahwa dalam beberapa konteks politik dinasti dapat memberikan dampak yang baik dalam pembangunan ekonomi. Melalui metode pengambilan data cahaya malam pada kota-kota besar yang identik dengan dinasti politiknya, Ludigil Garces dkk dapat melihat bahwa aktivitas ekonomi pada kota-kota tersebut dipandang cukup maju. Hal ini bisa terjadi karena politik dinasti diyakini mampu membawa stabilitas yang baik pada sistem pemerintahan, dimana kebijakan yang dihasilkan biasanya saling berkesinambungan sehingga dapat mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang baik (Garces, Jandoc, & Lu, 2021).

Pertentangan mengenai dampak positif dan negatif dari fenomena politik dinasti telah menimbulkan beragam persepsi dari masyarakat. Dengan munculnya berbagai keluarga politisi yang maju pada kontestasi politik di tingkat nasional dan daerah, telah menunjukan adanya dominasi yang kuat pada tokoh politik tertentu. Yang terbaru, Presiden Jokowi yang sejak dulu dikenal memiliki citra sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat diyakini oleh pengamat sedang membangun dinasti politiknya di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kerabat terdekatnya yang maju pada berbagai kontestasi politik mulai dari Gibran sebagai putra pertamanya yang maju pada Pilkada

Solo 2020 dan Pilpres 2024, Bobby sebagai menantunya yang maju pada Pilkada Medan 2020 dan Pilkada Sumatera Utara 2024, serta yang terbaru Kaesang sebagai putra ketiganya yang diyakini hampir saja maju pada Pilkada Jawa Tengah 2024 apabila tidak terkendala syarat batasan usia. Selain itu, kerabat keluarga Presiden Jokowi juga banyak menempati posisi strategis pada berbagai lembaga mulai dari Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai keponakan Jokowi yang menjabat sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero), hingga Anwar Usman sebagai adik ipar Jokowi yang sempat menjabat sebagai ketua MK (Bhayangkara, 2024).

Berbagai fenomena tersebut telah memunculkan beragam reaksi di masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai kelanjutan dari politik dinasti yang kian menguat, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dalam demokrasi. Persepsi masyarakat terhadap politik dinasti, khususnya dalam konteks politik dinasti Presiden Jokowi menjadi penting untuk diteliti guna memahami bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang memandang fenomena ini. Kota Solo merupakan tempat lahir dan pusat karir politik Presiden Jokowi, dimana Solo telah menjadi contoh konkret dari pengaruh politik dinasti yang dibangun Presiden Jokowi. Melalui kota ini, Presiden Jokowi berhasil melanjutkan karier politiknya ke tingkatan yang lebih tinggi mulai dari Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia. Adapun Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, sehingga dapat menjadi tempat strategis untuk memahami pandangan masyarakat yang lebih beragam dan dapat membantu mengungkapkan bagaimana politik dinasti Presiden Jokowi diterima pada daerah dengan konteks politik yang lebih kompleks dan heterogen.

Pemaparan diatas melatarbelakangi peneliti untuk mengambil sebuah judul penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi (Studi

Pada Masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang)”. Peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini karena politik dinasti telah menjadi fenomena yang menonjol dalam dinamika politik di Indonesia. Penelitian ini akan berusaha untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi. Dengan menganalisis persepsi masyarakat terhadap politik dinasti, peneliti berharap dapat memberikan wawasan tentang bagaimana politik dinasti diterima atau ditolak oleh masyarakat. Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai tolak ukur dalam memprediksi apakah praktik politik dinasti di Indonesia akan terus berkembang atau justru dapat diminimalisir seiring dengan dinamika politik yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yakni manfaat praktis dan teoritis, diantaranya sebagai berikut:

1) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun masyarakat yang ingin mengetahui sejauh mana politik dinasti Presiden Jokowi dapat diterima oleh masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam memprediksi apakah praktik

politik dinasti di Indonesia akan terus berkembang atau justru dapat diminimalisir seiring dengan dinamika politik yang terjadi.

2) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi studi politik dinasti, khususnya dalam memperluas kajian terkait teori perilaku memilih dan teori komunikasi politik. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan melihat kajian sebelumnya yang berkaitan dengan judul tesis. Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti akan membagi kajian pustaka menjadi dua tema yaitu tentang politik dinasti dan persepsi.

1.5.1 Politik Dinasti

Kajian tentang politik dinasti telah banyak dikaji oleh para ahli atau peneliti. Diantaranya yakni Michael Quester (2019), Kanchan Candra (2016), Yunas Derta Luluardi dan Ayon Diniyanto (2021), Novia Fatimatuzzahra dan Dian Suluh Kusuma Dewi (2021), Zaldi Rusnaedy dkk (2021), Hagi Hutomo Mukti dan Rodiyah (2020), Sri Budi Eko Wardani dan Valina Singka Subekti (2020), serta Titin Purwaningsih dan Bambang Eka Cahya Widodo (2020).

Michael Quester (2019) menulis kajiannya tentang politik dinasti pada bukunya yang berjudul “*Dynastic Politics and the British Reformations, 1558-1630*”. Dalam kajiannya Quester membahas tentang dinamika politik dinasti di Inggris selama periode reformasi agama dari tahun 1558 hingga 1630. Fokus utama buku ini adalah pada bagaimana politik dinasti dan isu-isu agama saling berpengaruh dalam kebijakan pemerintahan, terutama di bawah kekuasaan Ratu Elizabeth I dan Raja James I (Questier, 2019). Sementara itu, Kanchan Candra

(2016) menulis kajiannya tentang politik dinasti pada bukunya yang berjudul *“Democratic Dynasties: State, Party, and Family in Contemporary Indian Politics”*. Dalam kajiannya Kanchan Candra membahas tentang bagaimana dinasti politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi di India, di mana keluarga-keluarga politik tertentu berhasil mempertahankan kekuasaan mereka (Candra, 2016).

Yunas Derta Luluardi dan Ayon Diniyanto (2021) menulis kajiannya tentang politik dinasti pada artikelnya yang berjudul *“Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent Has The Election Law Been Reformed?”*. Dalam kajiannya Yunas dan Ayon menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan dan reduksi politik dinasti di Wilayah Tegal Raya. Hasilnya, ditemukan bahwa politik dinasti yang dipimpin oleh marga Dewi Sri di Tegal Raya mengalami perkembangan dan mampu menempatkan beberapa anggota marga Dewi Sri pada beberapa kekuasaan politik. Berdasarkan temuan tersebut, Yuna dan Ayon menekankan pentingnya reformasi pada UU Pemilu (Luluardi & Diniyanto, 2021). Sementara itu, Novia Fatimatuzzahra dan Dian Suluh Kusuma Dewi (2021) menulis kajiannya tentang politik dinasti pada artikelnya yang berjudul *“The Pattern of Joko Widodo's Political Dynasty Practices”*. Dalam kajiannya, Novia dan Dian membahas bagaimana media mengulas pola politik dinasti di Indonesia, khususnya pada era kepemimpinan Joko Widodo. Hasilnya, Novia dan Dian mengindikasikan adanya keterlibatan Jokowi dalam menggunakan kapasitasnya sebagai presiden dalam pencalonan Gibran dan Bobby pada Pilkada Serentak 2020 (Fatimatuzzahra & Dewi, 2021).

Zaldi Rusnaedy dkk (2021) menulis kajiannya tentang politik dinasti pada artikelnya yang berjudul *“Political Dynasty and Single Candidate in Indonesian*

Local Elections: Where Are The Parties?”. Dalam kajiannya, Zaldi dkk membahas mengenai fenomena politik dinasti dan calon Tunggal pada pilkada serentak di Indonesia. Hasilnya, Zaldi dkk menemukan bahwa dua fenomena ini mengkooptasi demokrasi lokal dan menyumbat sirkulasi elit kepemimpinan. Kedua fenomena tersebut disebabkan oleh proses rekrutmen dan seleksi kandidat internal yang buruk (Rusnaedy, Fatma, & Haris, *Political Dynasty and Single Candidate in Indonesian Local Elections: Where Are The Parties?*, 2021). Sementara itu, Hagi Hutomo Mukti dan Rodiyah (2020) menulis kajiannya tentang politik dinasti pada artikelnya yang berjudul “*Dynasty Politics In Indonesia: Tradition Or Democracy?*”. Dalam kajiannya, Hagi dan Rodiyah menemukan bahwa maraknya dinasti politik, khususnya di daerah, tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pemilu. Selama ini, terdapat kecenderungan calon dicalonkan oleh partai politik berdasarkan keinginan elite partai, dan pada saat yang sama dinasti politik terus membangun jaringan kekuasaan yang kuat (Mukti & Rodiyah, 2020).

Sri Budi Eko Wardani dan Valina Singka Subekti (2020) menulis kajiannya tentang politik dinasti pada artikelnya yang berjudul “*Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia’s 2019 Election*”. Dalam kajiannya, Sri dan Valina menemukan bahwa hampir setengah (44%) kandidat perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen nasional Indonesia pada tahun 2019 adalah anggota dinasti politik. Sri dan Valina menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kandidat perempuan dinasti ini tidak menghilangkan bias gender dalam partai, tetapi malah meminggirkan banyak kandidat partai perempuan yang memenuhi syarat (Wardani & Subekti, 2020). Sementara itu, Titin Purwaningsih dan Bambang Eka Cahya Widodo (2020) menulis kajiannya tentang politik dinasti

pada artikelnya yang berjudul “*The Interplay of Incumbency, Political Dynasty and Corruption in Indonesia: Are Political Dynasties The Cause of Corruption in Indonesia?*”. Dalam kajiannya, Titin dan Bambang menemukan bahwa pilkada langsung memberikan peluang yang lebih besar bagi petahana untuk membangun dinasti politiknya. Namun demikian, korupsi di tingkat daerah dilakukan oleh kepala daerah dinasti dan non-dinasti, sehingga untuk meminimalkan korupsi bukan melalui pembatasan dinasti politik tetapi dengan memperkuat kontrol pemerintah (Purwaningsih & Widodo, 2020).

Hasil telaah yang dilakukan peneliti terhadap delapan kajian pustaka diatas menunjukan bahwa terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada fokus pembahasan, objek penelitian, dan metode penelitian. Beberapa penelitian tersebut berfokus pada politik dinasti dan revolusi Inggris, politik dinasti di India, politik dinasti dalam perspektif hukum, pola politik dinasti Presiden Jokowi, politik dinasti dan kandidat tunggal pada pilkada, tradisi politik dinasti, politik dinasti dan kandidat perempuan, serta interaksi antara politik dinasti dan kasus korupsi di Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini akan berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, dan politik mereka, serta bagaimana media dan opini publik berperan dalam membentuk persepsi tersebut.

1.5.2 Persepsi

Kajian tentang persepsi telah banyak dikaji oleh para ahli atau peneliti, diantaranya yakni Diki Saputra Siregar dkk (2024), Annisa Nur Fadilah dkk

(2022), Joko Suryono dkk (2018), serta Fitra Hermansyah dan Agus Satmoko Adi (2017). Diki Saputra Siregar dkk (2024) menulis kajiannya tentang persepsi pada artikelnya yang berjudul “Persepsi Al-Qur’an Terhadap Dinasti Politik (Tinjauan Surah Al-Baqarah Ayat 124 dan At-Taubah Ayat 12 dan 23 Perspektif Tafsir Al-Misbah)”. Dalam kajiannya, Diki dkk menemukan beberapa hasil temuan. Pertama, kekuasaan dan kepemimpinan berasal dari Tuhan dan bukan merupakan hak istimewa berdasarkan garis keturunan. Kedua, Al-Qur’an melaknat dan memberi peringatan keras terhadap pemimpin yang kufur, yaitu pemimpin yang tidak menepati janjinya (Siregar, Siregar, & Nugraha, 2024). Sementara itu, Annisa Nur Fadilah dkk (2022) menulis kajiannya tentang persepsi pada artikelnya yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Dinasti Politik di Provinsi Banten”. Dalam kajiannya, Annisa dkk menemukan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dinasti politik memiliki dampak buruk yang dapat membahayakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, Anissa dkk meminta pemerintah bisa membuat peraturan yang lebih jelas dan lebih tegas tentang larangan praktik dinasti politik (Fadilah, Suparman, Mutiara, & Salsabil, 2022).

Joko Suryono dkk (2018) menulis kajiannya tentang persepsi pada artikelnya yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti di Indonesia”. Dalam kajiannya, Joko dkk menemukan bahwa persepsi negatif mahasiswa terhadap politik dinasti akan berdampak pada ketidakpercayaan mahasiswa kepada pejabat publik melalui pembicaraan politik yang mengarah kepada pengembangan emosi politik yang berupa sindiran-sindiran, kemarahan politik, teriakan politik, penyesalan politik. yang memperkeruh konflik politik (Suryono, Astuti, Rahayu, & Hariyanto, 2018). Sementara itu, Fitra Hermansyah

dan Agus Satmoko Adi (2017) menulis kajiannya tentang persepsi pada artikelnya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”. Dalam kajiannya, Fitra dan Agus menemukan bahwa 90,15% masyarakat memiliki kedekatan dengan kepala desa, pemahaman masyarakat tentang politik dinasti sebesar 88,5%, 90,14% masyarakat memahami adanya faktor kuatnya politik dinasti diakibatkan jaringan kekuasaan pemimpin terdahulu hingga politik balas budi dan politik uang, 89,83% masyarakat menyadari dampak negati yang akan ditimbulkan politik dinasti, serta 80,1% masyarakat menganggap politik dinasti adalah wajar dan sah (Hermansyah & Adi, 2017).

Hasil telaah yang dilakukan peneliti terhadap keempat kajian pustaka diatas menunjukan bahwa terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Beberapa penelitian tersebut berfokus pada persepsi Al-Qur'an terhadap politik dinasti, persepsi masyarakat terhadap politik dinasti di Banten, persepsi mahasiswa terhadap politik dinasti di Indonesia, serta persepsi masyarakat terhadap politik dinasti di Desa Kepuh, Kabupaten Nganjuk. Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, Dimana penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi. Penelitian ini akan berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, dan politik mereka, serta bagaimana media dan opini publik berperan dalam membentuk persepsi tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Definisi Politik Dinasti

Dinasti merupakan sistem kekuasaan kuno yang sangat populer di era kerajaan, dimana kepemimpinan hanya berasal dari satu darah keturunan yang sama. Menurut Martien Herna, politik dinasti dan dinasti politik memiliki arti yang berbeda. Politik dinasti adalah proses pergantian kekuasaan yang melibatkan kepentingan pada suatu kalangan yang masih berasal dari satu keluarga, dengan maksud untuk memperoleh dan menjaga kekuasaan yang dimilikinya. Adapun dinasti politik merupakan sistem kekuasaan kuno yang digunakan pada era primitif dengan menggantungkan kepemimpinan pada satu garis keturunan keluarga yang sama (Susanti, 2017).

Sederhananya, politik dinasti bukanlah sebuah sistem kekuasaan, melainkan proses berlangsungnya pergantian kekuasaan yang cakupannya ada pada suatu kalangan keluarga, baik itu antara orangtua dengan anaknya, suami dengan istrinya, maupun kakak dengan adiknya. Hal ini berbeda dengan dinasti politik yang merupakan sebuah sistem pergantian kekuasaan, dimana sistem ini mengharuskan pergantian kekuasaan hanya pada satu kalangan saja, sehingga sistem inilah yang menjadi akar penyebab terjadinya politik dinasti tersebut. Pada hakikatnya, praktik politik dinasti terjadi ketika penguasa memberikan kemudahan bagi anggota keluarganya untuk masuk dan menduduki jabatan strategis melalui rekrutmen yang dilakukan penguasa.

Menurut Marcus Mietzner, politik dinasti adalah praktik demokrasi yang tidak sehat, dimana proses ini membatasi peluang bagi masyarakat dengan kompetensi dan prestasi yang baik untuk memimpin (Bimantara & Harsasto, 2018). Mietzner memandang politik dinasti sebagai sekumpulan orang yang terikat pada hubungan kekerabatan, dimana mereka saling membantu untuk menduduki jabatan tertentu dan mengisi serta menggantikannya secara berkala

sesuai dengan batasan periode yang berlaku. Hubungan kekerabatan menjadi asas dasar dalam politik dinasti. Hal ini disebabkan karena kekuasaan yang dimiliki keluarga dapat relatif memudahkan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, utamanya bagi anggota keluarga yang berkuasa pada jabatan-jabatan strategis (Windi, 2017).

Menurut Novendra Bimantara, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah fenomena politik, dimana calon pemimpin yang muncul berasal dari anggota keluarga yang sedang berkuasa. Novendra menilai bahwa kekuasaan menjadi orientasi utama yang memicu terjadinya praktik politik dinasti pada pemerintahan, dimana rezim politik ini tercipta sebagai dampak dari rasa prihatin yang sangat tinggi dari anggota keluarga terhadap situasi politik. Kondisi ini kemudian membentuk lingkaran kekuasaan yang diduduki oleh suatu keluarga yang mencakup jabatan-jabatan strategis untuk memudahkan koordinasi maupun intruksi (Bimantara & Harsasto, 2018).

1.6.2 Karakteristik Politik Dinasti

Salah satu karakteristik utama dari politik dinasti adalah keberadaan pemimpin awal yang memiliki kharisma dan legitimasi yang kuat. Pemimpin pertama dalam dinasti ini biasanya berhasil membangun reputasi yang kokoh dan dihormati oleh masyarakat. Kharisma ini menjadi fondasi yang melegitimasi posisi kekuasaan yang dipegangnya dan menciptakan kepercayaan publik yang luas. Karena keberhasilan dan kharisma tersebut, masyarakat cenderung menganggap bahwa keturunan pemimpin ini akan mewarisi kualitas dan kemampuan yang sama, yang kemudian mendorong terbentuknya politik dinasti. Dengan kata lain, kharisma pemimpin awal menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mempertahankan kekuasaan dalam satu keluarga.

Karakteristik berikutnya dari politik dinasti adalah pewarisan kekuasaan yang terjadi secara turun-temurun dalam satu garis keluarga. Kekuasaan politik dalam dinasti sering kali dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui hubungan darah langsung, seperti dari ayah ke anak, atau dari satu anggota keluarga ke anggota lainnya. Proses pewarisan ini biasanya didasarkan pada prinsip keturunan, di mana anggota keluarga yang dianggap paling layak, baik karena usia, gender, atau hubungan kekerabatan, diangkat untuk melanjutkan kekuasaan. Pewarisan ini juga sering kali dilengkapi dengan persiapan khusus yang diberikan kepada calon penerus sejak dini, agar mereka siap mengambil alih peran kepemimpinan ketika saatnya tiba (Ihfron, 2024).

1.6.3 Aspek Pemicu Terjadinya Politik Dinasti

Politik dinasti tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan hasil dari berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikut aspek-aspek penyebab terjadinya politik dinasti:

1) Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah tahapan awal dalam menyeleksi calon pemimpin, dimana biasanya dilakukan secara internal di tingkat partai dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti elektabilitas dan keuntungan timbal balik bagi partai. Menurut Firmanzah yang dikutip oleh Zaldi Rusnaedy, rekrutmen politik merupakan fase awal bagi partai untuk mendapatkan kandidat yang cocok dalam mengikuti kontestasi politik, baik itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Proses ini dilakukan dengan melihat keselarasan visi misi, serta ideologi yang dimiliki kandidat dengan partai. Kandidat yang paling cocok dan memenuhi

kualifikasi akan direkrut oleh partai politik untuk mengikuti kontestasi politik (Rusnaedy, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka partai politik dipandang sebagai aktor penting dalam menetapkan calon pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sayangnya, proses rekrutmen politik yang dilakukan secara internal dan tertutup telah menjadi aspek pemicu terjadinya politik dinasti. Melalui rekrutmen politik yang tertutup, partai politik bisa saja memilih calon pemimpin yang berasal dari keluarga penguasa tanpa mempertimbangkan kualitas kandidat sebagai aspek yang jauh lebih penting. Hal ini dapat terjadi ketika partai politik lebih mengutamakan popularitas dan modalitas sebagai aspek utama dalam memilih kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum (Nizar & Alqarni, 2021).

2) Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pengenalan sistem politik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dengan tujuan untuk menghasilkan persepsi serta reaksi terhadap berbagai fenomena politik. Selain itu, sosialisasi politik juga dapat dimaknai sebagai proses dalam mengakomodasi pengenalan berbagai nilai politik kepada orang lain, dengan harapan orang tersebut bisa berpartisipasi dan terlibat dalam sebuah sistem politik.

Dalam lingkup yang terkecil, seorang politisi dengan pengaruh kuat memiliki peran yang sangat besar dalam membangun pemahaman politik, baik di masyarakat maupun di dalam keluarganya. Melalui kemampuannya, politisi tersebut dapat mempengaruhi kerabat keluarganya untuk memunculkan minat serta ketertarikan pada politik, sehingga kelak diharapkan dapat meneruskan

kekuasaannya. Dalam konteks ini, sosialisasi politik yang dibentuk dalam keluarga dapat membentuk dinasti politik. Hal tersebut dikarenakan adanya pengetahuan politik dan pewaris peminat politik yang diberikan oleh orang tua kepada anak, suami kepada istri, maupun kakak kepada adiknya (Rusnaedy, 2020).

3) Patronase Politik

Patronase adalah konsep kekuasaan yang merujuk pada dorongan, dukungan, serta pemberian bantuan ataupun hak istimewa dari seorang patron (penguasa) kepada seorang klien (pengikut). Dalam politik, patronase juga dapat dimaknai sebagai pembagian keuntungan yang dilakukan oleh setiap aktor politik guna menghasilkan dukungan dari pemilih, broker, maupun pegiat kampanye. Patronase politik tercipta sebagai dampak dari koneksi yang tidak seimbang antara patron sebagai penguasa yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi, dengan klien sebagai pengikut yang memiliki kedudukan dan derajat yang lebih rendah.

Patronase politik merupakan salah satu aspek pemicu terjadinya praktik politik dinasti. Melalui patronase, penguasa dapat mengunci pos-pos esensial dalam pemerintahan, sehingga memungkinkan kerabat keluarganya untuk masuk dan mengisi jabatan-jabatan strategis sesuai dengan tujuan politiknya. Di sisi lain, melalui patronase, penguasa juga dapat mengunci pos-pos esensial dalam lingkup masyarakat untuk dapat menggerakkan pemilih dan pegiat kampanye dalam menggiring dukungannya pada kerabat keluarganya dalam suatu kontestasi politik. Selain itu, patronase juga memungkinkan penguasa untuk menciptakan elit pluralis, sehingga dinasti politiknya dapat terjaga dan terhindar dari pergolakan masyarakat yang tidak sejalan dengannya.

4) Lemahnya Institusionalisasi Partai Politik

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand yang dikutip oleh Agus Riwanto, institusionalisasi diartikan sebagai pelebagaan sistem kepartaian, dimana pada proses ini terjadi berbagai upaya penguatan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya (Riwanto, 2016). Demokratisasi pada internal partai politik menjadi salah satu kunci upaya penguatan pada pelebagaan sistem kepartaian. Melalui proses pelebagaan yang baik, partai politik dapat menghadirkan calon pemimpin yang sesuai dengan kesepakatan bersama, bukan hanya kesepakatan elite tertentu. Untuk itu, partai politik harus banyak melibatkan setiap anggota partai politik dalam pengamblan keputusan, agar institusionalisasi partai politik semakin kuat. Apabila institusionalisasi yang dilakukan partai politik lemah, maka praktik politik dinasti dapat dengan mudah terjadi (Nurdin, Saputra, & Prayitno, 2019).

1.6.4 Jenis-Jenis Politik Dinasti

Terdapat beberapa jenis politik dinasti menurut Wasisto Rahajo Djati. Adapun jenis-jenis politik dinasti tersebut adalah sebagai berikut;

1) *Octopussy Dynasties* (Dinasti Jaringan Kekuasaan)

Octopussy dynasties, atau disebut juga sebagai dinasti jaringan kekuasaan adalah politik dinasti yang terjadi atas dasar jaringan kekuasaan. Figur kharismatik dan sinergi yang kuat antara aktor formal dan informal menjadi faktor terbentuknya jenis politik dinasti ini. Biasanya, rezim pada *Octopussy Dynasties* memiliki karakter yang bersifat oligarki, dimana kekuasaan politik dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau golongan elit (Riswanto, 2020). Dinasti jenis *octopussy* merupakan strategi politik

kekerabatan yang dilakukan dengan terstruktur dan tersistematis dalam penempatan kerabatnya pada jabatan politik tertentu. Salah satu contoh fenomena *octopussy dynasties* dapat dilihat pada kasus Ratu Atut di Banten, dimana Ratu Atut memperluas jaringan kekuasaan keluarganya di Banten dengan menempatkan kerabat keluarganya dalam berbagai jabatan politik di Banten (Djati, 2013).

2) *Populism Dynasties* (Dinasti Populisme)

Populism dynasties atau disebut juga sebagai dinasti populisme adalah usaha yang dilakukan penguasa untuk menarik simpati masyarakat dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat melalui usaha mempertahankan program yang telah dibangun pemimpin sebelumnya. Jenis politik dinasti ini lebih menekankan pada program populis pemimpin sebelumnya yang masih merupakan kerabat keluarganya untuk dijadikan objek kampanye dalam memenangkan kontestasi pemilihan umum. Salah satu contoh fenomena *populism dynasties* dapat dilihat pada kasus terpilihnya Sri Suryawidati sebagai Bupati Bantul periode 2010-2015 menggantikan suaminya, Idham Samawi. Dalam proses kampanye, Sri Suryawidati tidak terlalu menjual figure suaminya melainkan keberlanjutan program yang sebelumnya telah dijalankan oleh suaminya seperti pengembangan pariwisata, pemberdayaan ekonomi lokal, dan lain sebagainya (Djati, 2013).

3) *Tribalism Dynasties* (Dinasti Tribalisme)

Tribalism dynasties atau disebut juga sebagai dinasti tribalism adalah politik dinasti yang menekankan pada sentimen kesukuan, etnisitas, dan semangat kedaerahan sebagai strategi untuk memperoleh jabatan politik tertentu. Dalam praktiknya, biasanya penguasa akan menekankan

masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki kesamaan suku dan marga kekeluargaan, sehingga anggota keluarganya dapat terpilih untuk meneruskan jabatan politik yang dimilikinya (Haryanto, 2014). Salah satu contoh fenomena *tribalism dynasties* dapat dilihat pada kasus politik dinasti Syahrul Yasin Limpo yang merupakan mantan Menteri Pertanian periode 2019-2023, serta mantan Gubernur Sulawesi 2008-2018. Dalam proses terpilihnya Yasin Limpo sebagai Gubernur, ia merepresentasikan putra dari orang kuat di Sulawesi Selatan yang mewakili etnis Gowa Makassar dalam kontestasi politik (Djati, 2013).

1.6.5 Persepsi Masyarakat

Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa latin, yakni *perceptio* yang memiliki arti mengambil atau menerima. Dalam bahasa Inggris, *perception* memiliki arti tanggapan, pengelihatian yang merupakan proses seseorang mendapat kesadaran mengenai segala sesuatu pada lingkungannya, melalui indra yang dimilikinya. Dengan adanya persepsi dapat dikonfirmasi bahwa individu memahami kondisi individu yang bersangkutan. Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated*, dimana segala sesuatu yang ada pada diri individu berperan dalam persepsi itu sendiri, termasuk emosi, pengalaman, keterampilan berpikir, kerangka kerja, dan aspek lain yang ada dalam komunitas individu tersebut. Dalam arti yang lebih luas persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang melihat atau menafsirkan suatu hal. Proses perseptual tidak dapat dipisahkan dari proses pengindraan. Indra adalah penghubung antara individu dan dunia. Dari rangsangan yang dirasakan oleh individu, diorganisasikan dan kemudian diinterpretasikan, individu mempersepsikan dan

memahami apa yang dipersepsikan, kemudian persepsi tersebut terbentuk (Sutrisman, 2019).

Persepsi juga dapat dikaitkan dengan istilah sikap, dimana sikap secara umum dimaknai sebagai penolakan, penilaian, suka atau tidak suka, atau kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu objek psikologis. Istilah "persepsi masyarakat" dapat diartikan sebagai pandangan agregat baik berupa pengaruh atau penolakan, penilaian, suka atau tidak suka, atau kepositifan atau kenegatifan dari sekelompok orang (berdasarkan sampel) yang ditanyai secara langsung tentang masalah atau peristiwa tertentu (Rohhayati, 2023).

Pada umumnya ada tiga cara yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran sikap, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Kuesioner sikap digunakan dengan mengukur nilai tertentu dalam objek sikap di setiap pernyataan, yang mana nantinya responden akan mengisi tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan. Penyusunan kuesioner sikap adalah dengan menyusun definisi operasional variabel yang akan diukur, kemudian memecah variabel menjadi beberapa sub variabel, membedakan pernyataan sikap, serta mengulas, dan meneliti pernyataan yang dibuat. Pengukuran sikap sering dibedakan antara dimensi pemahaman atau kognitif, perasaan atau afektif, dan penilaian atau evaluatif (Almond & Verba, 1963).

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik, terdapat tiga komponen yaitu komponen kognitif, afektif, dan evaluatif. Komponen kognitif adalah kemampuan yang menyangkut tingkat

pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seseorang terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya.

Sementara itu, komponen afektif menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Adapaun komponen evaluatif menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan (Almond & Verba, 1963).

1.7 Definisi Konseptual dan Operasional

1.7.1 Definisi Konseptual

1) Politik Dinasti

Politik dinasti dapat didefinisikan sebagai sistem pewarisan kekuasaan politik yang terjadi dalam satu garis keluarga secara turun-temurun, di mana anggota keluarga mendominasi jabatan-jabatan strategis, baik melalui pemilihan umum maupun rekrutmen politik. Fenomena ini didorong oleh kharisma dan legitimasi pemimpin awal yang menciptakan kepercayaan di masyarakat bahwa kualitas kepemimpinan dapat diwariskan. Politik dinasti sering kali melibatkan lingkaran kekuasaan yang eksklusif, di mana keluarga atau kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pemimpin berkuasa berupaya mempertahankan pengaruhnya melalui berbagai cara, termasuk sosialisasi politik, patronase, dan kontrol terhadap sumber daya. Meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, politik dinasti muncul akibat

kelemahan institusional dalam partai politik dan sistem rekrutmen yang cenderung pragmatis, sehingga mengutamakan popularitas dan jaringan keluarga di atas kapasitas individu.

2) Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah proses kompleks di mana individu menerima, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan dari lingkungan melalui indera, sehingga menghasilkan pemahaman atau pandangan terhadap suatu objek atau peristiwa. Persepsi melibatkan tiga komponen utama yakni (1) komponen kognitif mencakup pengetahuan, keyakinan, dan pemahaman terhadap objek; (2) komponen afektif yang berkaitan dengan emosi, perasaan suka atau tidak suka terhadap objek; serta (3) komponen evaluatif yang berkaitan dengan cara individu menilai bagaimana sistem politik berfungsi, termasuk penilaian mereka apakah institusi politik bekerja secara efektif atau adil.. Dengan kata lain, persepsi tidak hanya melibatkan aspek pikiran atau intelektual, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi dan tindakan yang muncul akibat pemahaman terhadap lingkungan atau situasi tertentu. Proses persepsi ini membantu individu memahami dan memberikan respons yang sesuai terhadap berbagai stimulus yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

1.7.2 Definisi Operasional

Sesuai dengan permasalahan, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel (variabel tunggal) yaitu persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi. Untuk menjelaskan variabel tersebut, peneliti menggunakan tiga indikator untuk mengukur persepsi yaitu indikator kognitif, afektif, dan evaluatif.

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi.	Kognitif, adalah pemahaman dan pengetahuan individu mengenai apa yang benar bagi objek yang dipersepsi	1. Pengetahuan masyarakat mengenai istilah politik dinasti. 2. Pengetahuan mengenai sumber informasi yang membentuk pemahaman masyarakat tentang istilah politik dinasti. 3. Pengetahuan masyarakat mengenai Gibran selaku putra pertama Presiden Jokowi yang pernah menjabat sebagai Walikota Solo periode 2021-2024. 4. Pengetahuan masyarakat mengenai terpilihnya Gibran selaku putra pertama Presiden Jokowi sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. 5. Pengetahuan masyarakat mengenai Bobby Nasution selaku menantu Presiden Jokowi yang pernah menjabat sebagai Walikota Medan periode 2021-2024. 6. Pengetahuan masyarakat mengenai pencalonan Bobby Nasution selaku menantu Presiden Jokowi sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029. 7. Pengetahuan masyarakat mengenai Kaesang selaku putra ketiga Presiden Jokowi yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028. 8. Pengetahuan masyarakat mengenai Bagaskara Ikhlasulla Arif selaku keponakan Presiden Jokowi yang menjabat sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero). 9. Pengetahuan masyarakat mengenai Anwar Usman selaku adik ipar Presiden Jokowi yang pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023.
	Afektif, perasaan	1. Pendapat masyarakat mengenai politik dinasti Presiden Jokowi.

	menyangkut aspek emosional subjektif individu terhadap objek persepsi dan berkaitan dengan sudut pandang masyarakat terhadap baik/tidaknya maupun setuju/tidaknya dengan objek yang dipersepsikan.	2. Pendapat masyarakat mengenai terpilihnya Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024. 3. Pendapat masyarakat mengenai terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. 4. Pendapat masyarakat mengenai terpilihnya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan periode 2021-2024. 5. Pendapat masyarakat mengenai pencalonan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029. 6. Pendapat masyarakat mengenai terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028. 7. Pendapat masyarakat mengenai ditunjuknya Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero). 8. Pendapat masyarakat mengenai ditunjuknya Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023. 9. Pendapat masyarakat mengenai politik dinasti Presiden Jokowi yang dapat meningkatkan risiko korupsi di kalangan pemerintah. 10. Pendapat masyarakat mengenai politik dinasti Presiden Jokowi yang dapat meningkatkan risiko kolusi di kalangan pemerintah. 11. Pendapat masyarakat mengenai politik dinasti Presiden Jokowi yang dapat meningkatkan risiko nepotisme di kalangan pemerintah. 12. Pendapat masyarakat mengenai politik dinasti Presiden Jokowi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. 13. Pendapat masyarakat mengenai politik dinasti Presiden Jokowi yang dapat meningkatkan stabilitas dalam pemerintahan.
--	---	--

		14. Pendapat masyarakat mengenai politik dinasti Presiden Jokowi yang dapat memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi.
	Evaluatif, berisi penilaian rasional individu terhadap objek, dengan mengevaluasi kinerja ataupun sistem dari objek yang dipersepsikan.	1. Penilaian masyarakat mengenai kinerja Gibran sebagai Walikota Solo periode 2021-2024. 2. Penilaian masyarakat mengenai kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. 3. Penilaian masyarakat mengenai kinerja Bobby Nasution sebagai Walikota Medan periode 2021-2024. 4. Penilaian masyarakat mengenai kinerja Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028. 5. Penilaian masyarakat mengenai kinerja Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina (Persero). 6. Penilaian masyarakat mengenai kinerja Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023. 7. Penilaian masyarakat mengenai dampak politik dinasti Presiden Jokowi.

Sumber: Olahan Data Peneliti, Definisi Operasional

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, analisis deskriptif bekerja untuk mendistribusikan data penelitian tentang persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang sederhana dan mudah dilakukan (tidak memerlukan pemahaman mengenai statistik yang terlalu dalam), serta dalam

penelitian kuantitatif prosedur pengumpulan data menggunakan presentasi angka, grafik, serta diagram yang menggambarkan fenomena yang diteliti (Haryanti, 2023).

1.8.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2024 di Kota Solo dan Kota Semarang. Kota Solo dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kota Solo merupakan kota kelahiran keluarga besar Presiden Jokowi, sehingga penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap politik dinasti Presiden Jokowi di Kota Solo merupakan hal yang menarik untuk dilakukan.
- b. Kota Solo merupakan tempat Presiden Jokowi memulai karir politiknya, dimana Presiden Jokowi menjabat sebagai Walikota Solo selama dua periode dalam kurun waktu 2005-2010 dan 2010-2012.
- c. Kota Solo dikenal sebagai salah satu basis utama PDI Perjuangan, sehingga dinamika politik di kota ini memberikan konteks yang menarik mengingat hubungan erat antara Presiden Jokowi dengan partai tersebut.

Adapun Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dengan dinamika sosial yang kompleks, sehingga dapat memberikan perspektif yang beragam mengenai politik dinasti Presiden Jokowi.
- b. Masyarakat Kota Semarang menawarkan konteks pandangan yang unik, mengingat Kota Semarang tidak memiliki ikatan emosional atau historis dengan Presiden Jokowi.
- c. Kota Semarang dikenal sebagai salah satu basis utama PDI Perjuangan, sehingga dinamika politik di kota ini memberikan konteks yang menarik mengingat hubungan erat antara Presiden Jokowi dengan partai tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap politik dinasti Presiden Jokowi.

1.8.3 Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Solo dengan rentang usia 17-74 tahun yang berjumlah 431.333 orang, serta masyarakat Kota Semarang dengan rentang usia 17-74 tahun yang berjumlah 1.335.494 orang. Data tersebut peneliti dapatkan dari data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Surakarta dan Kota Semarang, yang diterbitkan oleh BPS Kota Surakarta pada tahun 2023 serta BPS Kota Semarang pada tahun 2023. Populasi tersebut dipilih oleh peneliti karena masyarakat dengan rentang usia 17-74 tahun dapat menggambarkan representasi masyarakat yang sudah dewasa secara hukum, memiliki hak suara dalam pemilihan umum, memiliki tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi, serta pengalaman yang lebih luas terkait pemilu, kepemimpinan, dan politik dinasti.

2) Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Dengan menggunakan rumus yang dikemukakan Slovin, peneliti dapat menentukan besaran sampel.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = α (alpha) atau Tingkat Toleransi Kesalahan

Taraf signifikansi atau alpha yang digunakan peneliti sebesar 10%, artinya kesalahan pengambilan kesimpulan berada dinilai 10% sedangkan kebenaran kesimpulan atau taraf kepercayaan pada penelitian ini sebesar 90%. Dalam pengambilan sampel pertama, terdapat ukuran populasi sebanyak 431.333 yang diambil dari total keseluruhan populasi terkait, yaitu penduduk Kota Solo berusia 17-74 tahun. Berikut jumlah sampel yang diperoleh peneliti dengan menggunakan rumus Slovin 1960:

$$n = \frac{431.333}{1 + 431.333 (10\%^2)}$$

$$n = \frac{431.333}{1 + 431.333 (0,01)}$$

$$n = \frac{431.333}{1 + 4.313,33}$$

$$n = \frac{431.333}{4.314,33}$$

$$n = 99,97$$

$$n = 100 \text{ (Pembulatan)}$$

Adapun dalam pengambilan sampel kedua, terdapat ukuran populasi sebanyak 1.335.494 yang diambil dari total keseluruhan populasi terkait, yaitu penduduk Kota Semarang berusia 17-74 tahun. Berikut jumlah sampel yang diperoleh peneliti dengan menggunakan rumus Slovin 1960:

$$n = \frac{1.335.494}{1 + 1.335.494 (10\%^2)}$$

$$n = \frac{1.335.494}{1 + 1.335.494 (0,01)}$$

$$n = \frac{1.335.494}{1 + 13.354,94}$$

$$n = \frac{1.335.494}{13.355,94}$$

$$n = 99,99$$

$$n = 100 \text{ (Pembulatan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, sampel pada penelitian ini berjumlah 200 responden, dengan rincian 100 responden di Kota Solo dan 100 responden di Kota Semarang.

1.8.4 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *multistage random sampling*. Berdasarkan pendapat Martens (2014), teknik *multistage random sampling* merupakan kombinasi strategi pengambilan sampel. Peneliti menggunakan teknik *multistage random sampling* dengan alasan populasi penelitian yang besar meliputi wilayah Kota Solo dan Kota Semarang sehingga perlu menggunakan penentuan pengambilan sampel lebih dari satu.

Pertama, peneliti menggunakan *cluster sampling* untuk membagi populasi berdasarkan wilayah kecamatan. Menurut Ridwan dan Akdon (2013), *cluster sampling* adalah teknik *sampling* yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap wilayah geografis yang ada. Untuk itu, peneliti akan membagi wilayah berdasarkan jumlah kecamatan yang ada, yaitu Kota Solo sebanyak 5 kecamatan dan Kota Semarang sebanyak 16 kecamatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Surakarta, diketahui bahwa penduduk berusia 17-74 tahun di Kota Solo berjumlah 431.333 orang. Sementara itu, jumlah penduduk berusia 17-74 tahun di Kota Semarang berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Semarang berjumlah 1.335.494 orang. Adapun tabel sebaran penduduk berusia 17-74 tahun pada masing-masing kecamatan di Kota Solo dan Kota Semarang dapat dilihat secara rinci pada bagian lampiran.

Tahap kedua, peneliti membagi 100 sampel yang sebelumnya telah ditentukan jumlahnya berdasarkan rumus Slovin kepada 5 kecamatan di Kota Solo dan 16 Kecamatan di Kota Semarang dengan mengacaknya secara proporsional. Distribusi sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Distribusi Sampel Tiap Kecamatan di Kota Solo dan Kota Semarang

Kota Solo				Kota Semarang			
No	Kecamatan	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	No	Kecamatan	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Laweyan	77.782	18	1	Semarang Tengah	46.480	4
2	Serengan	41.187	9	2	Semarang Utara	97.367	7
3	Pasar Kliwon	64.652	15	3	Semarang Timur	56.230	4
4	Jebres	110.833	25	4	Gayamsari	57.699	4
5	Banjarsari	136.879	33	5	Genuk	96.298	7
				6	Pedurungan	156.001	12
				7	Semarang Selatan	53.559	4
				8	Candisari	62.240	5
				9	Gajahmungkur	46.881	4
				10	Tembalang	147.720	11
				11	Banyumanik	113.128	8
				12	Gunungpati	77.333	6
				13	Semarang Barat	123.679	9
				14	Mijen	62.107	5
				15	Ngaliyan	111.792	8
				16	Tugu	26.980	2
Jumlah		431.333	100	Jumlah		1.335.494	100

Sumber: BPS Kota Surakarta dan BPS Kota Semarang

Dari tabel di atas, diketahui bahwa setiap kecamatan di Kota Solo dan Kota Semarang memiliki jumlah sampel yang beragam. Jumlah ini diperoleh melalui perhitungan secara proporsional, dengan memperhatikan keseimbangan antara proporsi jumlah populasi dengan proporsi jumlah sampel di setiap kecamatan. Semakin besar jumlah populasi pada suatu kecamatan, maka semakin besar pula jumlah sampel yang ada. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jumlah populasi pada suatu kecamatan, maka semakin kecil pula jumlah sampel yang ada

Tahap ketiga, peneliti mendistribusikan kembali sampel yang telah ditentukan jumlahnya pada setiap kecamatan ke masing-masing kelurahan yang ada. Sama seperti tahap sebelumnya, distribusi dilakukan dengan mengacaknya secara proporsional kepada 54 kelurahan di Kota Solo dan 177 kelurahan di Kota Semarang. Adapun tabel distribusi sampel pada setiap kelurahan dapat dilihat secara rinci pada bagian lampiran.

Terakhir, peneliti menggunakan *accidental sampling* untuk menentukan responden penelitian. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara aksidental dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Syahrums & Salim, 2012). Untuk itu, peneliti akan menentukan responden berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan dijumpai peneliti pada setiap kelurahan yang termasuk ke dalam sampel.

1.8.5 Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana dalam mengukur data kuantitatif digunakan suatu skala numerik (angka). Skala numerik tersebut kemudian dapat dikelompokkan menjadi data interval dan data rasio. Dalam mengolah data kuantitatif dapat menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan sistem statistik.

2) Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan, dimana dalam penelitian ini diperoleh data primer dari hasil

penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan seputar persepsi masyarakat terhadap politik dinasti Presiden Jokowi.

b) Data Sekunder

Data-data yang sudah ada sebelumnya kemudian digunakan menjadi sumber data dalam penelitian merupakan data sekunder. Data sekunder ini dapat berupa literatur buku, dokumen-dokumen resmi dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mana akan menjadi pendukung bagi data primer.

1.8.6 Skala Pengukuran

Dalam mengukur persepsi masyarakat, penelitian ini menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran penelitian. Skala likert sendiri merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Kemudian dalam skala likert, variabel penelitian diukur, dijabarkan dan dijadikan sebagai indikator variabel. Selanjutnya indikator-indikator tersebut menjadi dasar untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik yakni penyebaran kuesioner dan dokumentasi.

1) Penyebaran Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu dengan cara memberikan kuesioner yang berisi pernyataan dan pertanyaan kepada masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang yang termasuk anggota sampel. Dalam kuesioner

penelitian ini terdapat 30 item pertanyaan yang terbagi menjadi 9 pertanyaan kognitif, 14 pertanyaan afektif, dan 7 pertanyaan evaluatif. Seluruh pertanyaan pada penelitian ini terdiri dari pertanyaan negatif maupun positif untuk memperjelas pandangan masyarakat mengenai politik dinasti Presiden Jokowi.

2) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan pada data yang terkait dengan politik dinasti Presiden Jokowi, baik yang sudah dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi data yang sudah didapat dari penyebaran kuesioner.

1.8.8 Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif untuk dapat mengukur dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap politik dinasti Presiden Jokowi. Analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase, dimana semua skor dari masing-masing aspek dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor idealnya sehingga akan menghasilkan persentase skor. Dari deskriptif persentase inilah selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan diketahui tingkatannya.

1.9 Uji Validitas dan Reabilitas

1.9.1 Uji Validitas

Validitas adalah tingkat kesahihan alat ukur yang digunakan, dimana instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang masyarakat Kota Solo dan 100 orang masyarakat Kota Semarang, dengan jumlah pertanyaan dalam kuesioner sebanyak 30 butir.

Data yang telah didapatkan dari para responden nantinya akan diolah dengan dilakukannya tabulasi serta coding ke dalam Microsoft Excel, kemudian dilakukan uji validitas dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 22. Pada penelitian ini, data dikatakan valid apabila $R \text{ hitung} > R \text{ tabel}$. Nilai signifikansi $R \text{ tabel}$ yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5% atau sebesar 0,195. Maka, data dinyatakan valid apabila memiliki nilai $R \text{ hitung}$ yang lebih besar dari 0,195.

Berikut hasil uji validitas yang telah dilakukan pada instrumen penelitian di Kota Solo:

Tabel 1. 3 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian di Solo

Variabel	Indikator	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi.	Kognitif	1	0,366	0,195	Valid
		2	0,366	0,195	Valid
		3	0,366	0,195	Valid
		4	0,242	0,195	Valid
		5	0,242	0,195	Valid
		6	0,357	0,195	Valid
		7	0,271	0,195	Valid
		8	0,293	0,195	Valid
	Afektif	1	0,703	0,195	Valid
		2	0,557	0,195	Valid
		3	0,760	0,195	Valid
		4	0,784	0,195	Valid
		5	0,775	0,195	Valid
		6	0,618	0,195	Valid
		7	0,760	0,195	Valid
		8	0,781	0,195	Valid
		9	0,550	0,195	Valid
		10	0,615	0,195	Valid
		11	0,646	0,195	Valid
		12	0,604	0,195	Valid
		13	0,712	0,195	Valid
		14	0,724	0,195	Valid
	Evaluatif	1	0,720	0,195	Valid
		2	0,757	0,195	Valid
		3	0,677	0,195	Valid
		4	0,744	0,195	Valid
		5	0,601	0,195	Valid
		6	0,723	0,195	Valid
		7	0,761	0,195	Valid

Sumber: Olahan Data Peneliti, Uji Validitas

Berdasarkan data hasil uji validitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan pada instrumen penelitian di Kota Solo memiliki nilai R hitung lebih besar dari 0.195, sehingga seluruh item pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Adapun hasil uji validitas yang telah dilakukan pada instrumen penelitian di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian di Semarang

Variabel	Indikator	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Persepsi masyarakat Kota Solo dan Kota Semarang terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi.	Kognitif	1	0,212	0,195	Valid
		2	0,239	0,195	Valid
		3	0,403	0,195	Valid
		4	0,290	0,195	Valid
		5	0,215	0,195	Valid
		6	0,265	0,195	Valid
		7	0,273	0,195	Valid
		8	0,275	0,195	Valid
	Afektif	1	0,608	0,195	Valid
		2	0,706	0,195	Valid
		3	0,766	0,195	Valid
		4	0,682	0,195	Valid
		5	0,722	0,195	Valid
		6	0,704	0,195	Valid
		7	0,592	0,195	Valid
		8	0,753	0,195	Valid
		9	0,559	0,195	Valid
		10	0,428	0,195	Valid
		11	0,424	0,195	Valid
		12	0,492	0,195	Valid
		13	0,705	0,195	Valid
		14	0,610	0,195	Valid
	Evaluatif	1	0,743	0,195	Valid
		2	0,803	0,195	Valid
		3	0,645	0,195	Valid
		4	0,696	0,195	Valid
		5	0,507	0,195	Valid
		6	0,593	0,195	Valid
		7	0,648	0,195	Valid

Sumber: Olahan Data Uji Validitas Peneliti, Uji Validitas

Berdasarkan data hasil uji validitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan pada instrumen penelitian di Kota Semarang memiliki nilai R

hitung lebih besar dari 0.195, sehingga seluruh item pertanyaan tersebut dikatakan valid.

1.9.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kehandalan atau kestabilan suatu item pertanyaan dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen yang reliabel yaitu instrumen yang menghasilkan data yang konsisten dalam mengukur objek yang sama. Pada penelitian ini digunakan teknik *Cronbach Alpha* untuk menguji reliabilitas dengan menetapkan koefisien minimal sejumlah 0,60. Hal ini berarti instrumen dapat dinyatakan reliabel jika dalam uji instrumen tersebut memunculkan hasil lebih besar dari 0.60. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistic 22.

Berikut hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan pada instrumen penelitian di Kota Solo:

Tabel 1. 5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian di Solo

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>a</i> Standar	Keterangan
Persepsi masyarakat Kota Solo terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi.	0, 816	0,60	Reliabel

Sumber: Olahan Data Peneliti, Uji Reliabilitas

Berdasarkan data hasil uji realibilitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* memiliki nilai sebesar 0, 816. Angka tersebut lebih besar dari koefisien minimal sejumlah 0,60 sehingga seluruh item pertanyaan tersebut dikatakan reliabel.

Adapun hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan pada instrumen penelitian di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian di Semarang

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	α Standar	Keterangan
Persepsi masyarakat Kota Semarang terhadap Politik Dinasti Presiden Jokowi.	0,836	0,60	Reliabel

Sumber: Olahan Data Peneliti, Uji Reliabilitas

Berdasarkan data hasil uji realibilitias pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* memiliki nilai sebesar 0,836. Angka tersebut lebih besar dari koefesien minimal sejumlah 0,60 sehingga seluruh item pertanyaan tersebut dikatakan reliabel.